

## **Rendahnya Komitmen Pemerintah dalam Penanganan Masalah Gender di Sri Lanka**

*Bayu Setyawan*

Ilmu Pemerintahan - Universitas Kristen Palangkaraya

[bayu.dagut@gmail.com](mailto:bayu.dagut@gmail.com)

### **Abstract**

*As a developing country, Sri Lanka has problems facing other developing countries in the world. Start from the economic problems, food security and of course social and cultural. One of them is the issue of gender which has been a classic problem in Sri Lanka. The Sri Lanka people who still uphold their culture and customs are important factors for analyzing gender issues in the country. The tight culture and customs that are still held by the majority of Sri Lanka society, influence the stakeholders who should be the main spearhead of gender equality for women. Moreover, seeing the original culture which prioritizes men over women in various aspects, making women in Sri Lanka do not have the courage to do social breakdown for the freedom of women in their country. This also makes policy products (legislation) in Sri Lanka gender biased, because the perspectives of women who are actively involved in the legalization process in the country are very minimal. How exactly is public policy to cope with gender inequality in Sri Lanka? This paper seeks to explore how the policies of the Sri Lankan government towards the fulfillment of women's rights, which until now is still a social problem, is a fetter for women from their independence.*

**Keywords :** *Sri Lanka, policy, gender inequality*

### **Abstrak**

*Sebagai negara berkembang Sri Lanka memiliki masalah-masalah yang dihadapi negara-negara berkembang lainnya di dunia. Mulai dari masalah ekonomi, ketahanan pangan dan tentunya sosial budaya. Termasuk dalam pembahasan kali ini, yaitu masalah gender yang menjadi masalah klasik di Sri Lanka hingga saat ini. Masyarakat Sri Lanka yang masih memegang teguh budaya dan adat istiadatnya menjadi faktor penting untuk menganalisis masalah gender di negeri tersebut. Eratnya budaya dan adat istiadat yang masih dipegang oleh sebagian besar masyarakat Sri Lanka tersebut, mempengaruhi para pemangku kebijakan yang harusnya menjadi tombak utama kesetaraan gender bagi kaum perempuan. Apalagi melihat budaya asli yang mana lebih mengutamakan laki-laki dibanding perempuan dalam berbagai aspek, menjadikan perempuan di Sri Lanka tidak mempunyai keberanian untuk melakukan dobrakan sosial demi kemerdekaan kaum hawa di negrinya. Hal ini juga yang menjadikan produk kebijakan (perundang-undangan) di Sri Lanka menjadi bias gender, karena perspektif dari perempuan yang terlibat aktif dalam proses legisasi di negeri tersebut sangatlah minim. Lalu bagaimana sebenarnya kebijakan publik untuk menangani ketidaksetaraan gender di Sri Lanka? Tulisan ini berusaha, mengeksplorasi bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah Sri Lanka terhadap pemenuhan hak-hak perempuan yang hingga kini masih menjadi masalah sosial yang membelenggu kaum hawa dari kemerdekaan asasinya.*

**Kata Kunci:** *Sri Lanka, kebijakan, ketidaksetaraan gender*

## **Pendahuluan**

Perempuan sebagai entitas yang merdeka dan mandiri masih sulit diwujudkan di Sri Lanka. Hambatan bagi kaum perempuan di Sri Lanka dapat diidentifikasi meliputi dominannya kaum laki-laki di dalam kehidupan sosial. Kemudian juga ditentukan oleh faktor kurangnya biaya dan sumber daya bagi perempuan untuk ikut berpartisipasi pada tingkat politik, serta sering terjadinya kekerasan yang menimpa kaum perempuan. Di samping itu adanya faktor kurangnya pengetahuan di bidang politik oleh kaum perempuan serta dipicu oleh keadaan struktur sistem pemilihan di Sri Lanka saat ini.

Sejarah Sri Lanka membuktikan bahwa kaum perempuan yang mempunyai kapabilitas dalam berpartisipasi serta turut berperan aktif dalam bidang politik adalah perempuan yang berasal dari keluarga yang mempunyai latar belakang politik yang kuat dan dipandang sangat berpengaruh di Sri Lanka. Meskipun Sirimavo Bandaranaike dan kemudian putrinya, yaitu Chandrika Kumaratunga Bandaranaike pernah menjabat sebagai pemimpin Sri Lanka pada periode yang berbeda, tetapi untuk jabatan di sekeliling mereka tetap didominasi oleh kaum laki-laki, mereka juga berperan besar dalam setiap pengambilan keputusan di pemerintahan.

Adat istiadat serta sosial budaya di beberapa komunitas atau kelompok tertentu di Sri Lanka juga ikut serta membatasi aktivitas perempuan di luar rumah serta persentase kaum perempuan dalam ranah politik dan tingkat pemerintahan tidak sesuai jika dibandingkan dengan jumlah persentase populasi mereka di Sri Lanka.

## **Rendahnya Penghargaan Konstitusional Bagi Partisipasi Perempuan**

Di Sri Lanka tidak ada Undang-Undang yang mengatur mengenai jumlah persentase kuota politik bagi kaum perempuan sehingga hal itu menghambat peran politik mereka. Usulan kuota sebesar 25% hanya dianggap sebatas wacana dan tidak pernah terealisasi bagaimanapun sulitnya perempuan dalam menghadapi diskriminasi gender. Meskipun tidak dimasukkan dalam Undang-Undang mengenai partisipasi kaum perempuan dalam bidang politik, tanpa adanya suatu upaya dari pemerintah membuat mereka tidak dapat meningkatkan jumlah kuota politiknya di tingkat pemerintahan. Sehingga secara otomatis mereka dibatasi oleh situasi dan kondisi gender yang diskriminatif di Sri Lanka.

Sri Lanka juga pernah dipimpin oleh kaum perempuan, baik yang menjadi presiden maupun perdana menteri. Namun, hal tersebut juga tidak banyak membantu perkembangan keterlibatan dari kaum perempuan di dalam kancah perpolitikan. Profil politik tidak menunjukkan adanya mendukung untuk perempuan rata-rata, terlebih keterlibatan perempuan dalam kebijakan perencanaan dan pengambilan keputusan pada tingkat yang jauh lebih tinggi. Sebuah survei terbaru menemukan bahwa kaum perempuan di Sri Lanka kurang berminat dan bukan merupakan prioritas agar bisa lebih aktif dalam bidang politik, hal ini didukung dan

ditunjukkan oleh fakta bahwa hanya beberapa dari perempuan Sri Lanka yang memilih untuk berkarir di politik. Sebagian besar dari kaum perempuan di Sri Lanka tidak bercita-cita untuk berperan dalam bidang politik, hanya sebagian kecil dari mereka yang memilih untuk berkarir di bidang politik. Sehingga yang terjadi lebih sedikit jumlah kaum perempuan yang dipilih di parlemen, tingkat regional, dan provinsi (UN General Assembly, 1979).

Semua faktor-faktor tersebut mempresentasikan bahwa adanya suatu dimensi tersembunyi yang belum diungkapkan di dalam statistik yang telah dicetak. Dimensi yang jarang disorot dan hanya samar-samar terlihat oleh para pengamat. Di dalam konteks ini hanya dapat terungkap kebenarannya yaitu dengan mengatakan bahwa, meskipun telah mengutamakan dan menentukan indikator pembangunan sumber daya manusia, namun Sri Lanka masih memiliki jalan yang panjang untuk dapat sepenuhnya memanfaatkan keterampilan dan bakat serta potensi yang dimiliki oleh segenap kaum perempuan dalam memajukan dan membangun negaranya.

Hambatan kaum perempuan ini berhubungan dengan kesulitan Sri Lanka dalam menghadapi suatu bentuk demokrasi pada umumnya. Struktur birokrasi dalam pengambilan keputusan cenderung terpusat. Hal tersebut didukung oleh keberadaan sistem tradisional yang tertanam kuat yang sampai pada saat ini masih dipertahankan sehingga menjadi penghalang dan juga punya kontribusi besar menjaga proses politik agar tetap tertutup bagi kaum perempuan. Kaum perempuan jarang dipilih untuk menjadi seorang pemimpin di suatu kantor atau mendominasi suatu organisasi dikarenakan tradisi atau suatu kultur kebudayaan yang di dominasi oleh laki-laki (UN General Assembly, 1979).

Struktur budaya dan adat istiadat yang tertanam selama ini menunjukkan dominasi kaum laki-laki untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dan pemerintahan, apalagi di bidang politik. Oleh karenanya kaum perempuan Sri Lanka merasa bahwa politik bukanlah bidang mereka, walaupun mereka mempunyai potensi untuk itu, akan tetapi mereka merasakan tidak mempunyai kapabilitas. Mereka juga tidak mendapat dukungan dari keluarga maupun dari lingkungannya untuk berkarir di tingkat politik, sehingga sebagian besar memutuskan untuk bekerja kasar atau menjadi pembantu rumah tangga di luar negeri.

Perempuan yang ikut mencalonkan diri untuk menjadi kandidat dalam suatu proses pemilihan akan menghadapi berbagai macam bentuk dan juga hambatan dari suatu sistem pemilihan yang tidak sehat. Terkadang ada penggunaan cara kekerasan untuk mengintimidasi kandidat perempuan serta memanipulasi perolehan suara. Menurut sejumlah studi tentang perempuan di bidang politik, kaum perempuan juga kerap cenderung menghadapi pelecehan di dalam kehidupan publik sosial di Sri Lanka. Karena tingkat intimidasi dan bentuk kekuatan dari suatu sistem tradisional, juga status quo yang dipertahankan, sehingga membuat kaum perempuan terpinggirkan dari proses politik.

Berbagai alasan dan masalah melekat dalam sistem politik di Sri Lanka yang menghambat partisipasi politik kaum perempuan. Sistem partai politik di Sri Lanka

sangat di dominasi kaum laki-laki. Prioritas bagi kaum laki-laki pada sistem pemilihan suara telah membuat kaum perempuan tidak diberi kesempatan sehingga pada akhirnya putus asa untuk ikut berkompetisi dan berpartisipasi dalam pemilu.

Suatu bukti nyata dari seluruh penjuru dunia menunjukkan bahwa bidang politik adalah salah satu bidang yang paling sulit bagi kaum perempuan untuk dapat terlibat dan juga turut serta berperan aktif di dalamnya. Bahkan dengan indikator sosial-ekonomi yang kuat, suatu tindakan yang bersifat afirmatif juga dibutuhkan agar meningkatkan representasi perempuan dalam bidang politik (UN General Assembly, 1979).

Representasi dari kaum perempuan dalam bidang politik masih sangat rendah di Sri Lanka. Salah satu alasan utama adalah rendahnya jumlah nominasi yang diberikan kepada kaum perempuan oleh beberapa partai politik besar. Sri Lanka adalah satu-satunya negara di wilayah Asia Selatan tanpa kuota bagi perempuan di tingkat pemerintah daerah. Usulan untuk kuota maksimal 25% bagi perempuan Sri Lanka yang pernah dijanjikan tidak terealisasi. Dengan alasan bahwa partai politik kesulitan dalam menemukan figur seorang perempuan yang memenuhi persyaratan dan pada akhirnya tidak akan dapat menemukan kandidat perempuan. Hal tersebut bisa dipastikan dengan sendirinya kuota yang diharapkan tidak akan dapat terealisasi. Hal demikian didukung oleh karena kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan juga pelatihan politik. Belum adanya program-program yang memprioritaskan kaum perempuan pada pengembangan keterampilan telah menjadi faktor negatif yang menghambat partisipasi politik perempuan (Pinto-Jayawardena, 2003).

Salah satu alasan kritis adalah bahwa partai-partai politik telah secara konsisten memberikan nominasi perempuan hanya rata-rata sekitar 5%. Mereka menyangkal perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk ikut dalam proses pemilihan umum. Hal ini diperparah dengan adanya politik patronase dan nominasi antara laki-laki yang telah membatasi akses kaum perempuan terhadap perwakilan politik mereka.

### **Sikap Presiden Terhadap Peran Politik Perempuan**

Presiden Mahindra Rajapakse terlihat telah menyerah dan mundur dari janjinya untuk memperhatikan serta turut memprioritaskan representasi kaum perempuan pada tingkat politik di Sri Lanka.

Dalam salah satu manifestonya, Mahindra Rajapakse menjanjikan kuota sebesar 25% bagi representasi perempuan di tingkat dewan lokal dan provinsi. Akan tetapi hal itu tidak mempunyai pengaruh yang signifikan pada persentase terakomodirnya kaum perempuan yang dapat berperan pada tingkat politik.

Wacana tersebut bahkan terkesan tanpa adanya suatu keseriusan di dalam mengimplementasikannya. Sebagai suatu contoh, Presiden kemudian dalam pernyataan sikap pada tahun 2005 mengatakan: "Saya percaya bahwa kaum

perempuan di negara kita tidak boleh diberikan status yang sama dengan laki-laki, tetapi harus diberikan suatu prioritas yang lebih tinggi" (Yusoff, Sarjoon, & Othman, 2016).

Jumlah persentase dari kaum perempuan hanya naik tidak lebih dari 3% dari puluhan tahun keikutsertaannya pada tingkat parlemen. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa minimnya peningkatan jumlah kandidat perempuan. Peningkatan ini dikarenakan oleh pihak pinggiran dan juga kelompok independen yang jarang menang, mengalihkan perhatian dan juga menjatuhkan pilihan mereka tertuju pada kaum perempuan (Wickramasinghe & Kodikara, 2012).

Partai politik besar memiliki banyak properti kekayaan dan posisinya lebih kuat pada pemilihan. Akan tetapi mereka tidak mencalonkan perempuan dalam jumlah yang signifikan. Sebagai akibatnya, hal ini tidak menguntungkan bagi representasi kaum perempuan di tingkat politik.

### **Rendahnya Dukungan Pemerintah Terhadap Hak Suara Perempuan**

*The Beijing Platform of Action* atau BPFA pada tahun 1995 menyatakan bahwa proses pengambilan keputusan, tujuan kesetaraan, pembangunan dan perdamaian tidak dapat tercapai tanpa partisipasi aktif dan penggabungan perspektif perempuan pada semua tingkatan. Hak-hak ini sebenarnya telah dijamin dalam konvensi internasional yang menyatakan bahwa "Perempuan harus memenuhi syarat untuk pemilihan semua badan publik terpilih, yang telah ditetapkan oleh hukum nasional atas dasar persamaan dengan laki-laki, tanpa diskriminasi".

BPFA tahun 1995 bagian 181 mengatakan bahwa "partisipasi yang setara dari kaum perempuan dalam pengambilan keputusan tidak hanya permintaan untuk keadilan sederhana atau demokrasi, tetapi juga memperhitungkan kondisi-kondisi yang diperlukan untuk kepentingan dari kaum perempuan".

Hal ini kemudian ditegaskan tahun 2004 dalam Majelis Umum ke-58 pada Sidang Resolusi ke-58/142, bahwa partisipasi perempuan secara penuh dan setara dalam proses politik dan pengambilan keputusan akan memberikan keseimbangan komposisi dari masyarakat yang lebih akurat. Hal ini diperlukan untuk memperkuat tujuan dan mempromosikan demokrasi yang tepat. Selain itu juga berfungsi memainkan peran penting dalam memajukan status yang sama terhadap kaum perempuan, termasuk turut meningkatkan status sosial ekonomi kaum perempuan. Hal ini diharapkan dapat ikut memberikan kontribusi dalam mendefinisikan prioritas politik dan memberikan suatu perspektif baru pada masalah politik (Jayaweera, S. (2000). Untuk itu, The Millennium Development Goals (MDGs) dimaksudkan juga untuk memperjuangkan eksistensi kaum perempuan dalam politik sebagai indikasi kemajuan terhadap pemberdayaan perempuan.

Dalam wacana global, pembangunan membutuhkan sumber daya keputusan oleh kontrol perempuan yang meliputi aspek materi maupun aspek non-materi. Aspek non materi adalah termasuk kekuasaan politik. Kurangnya legislator

perempuan berarti kepentingan perempuan tidak terwakili secara memadai dalam lembaga tertinggi negara. Masyarakat sipil juga akan sulit mengubah suatu bentuk kekuatan sosial, politik dan ekonomi untuk bekerja dalam mendukung kaum perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender.

Sementara itu, UNDP telah masuk ke Sri Lanka sejak tahun 1967 yang bertujuan untuk menyetarakan gender dan memperbaiki posisi perempuan dalam ranah politik di Sri Lanka. Berdasarkan UNDP, partisipasi politik perempuan di Sri Lanka masih buruk. Terkhusus di Ampara, partisipasi perempuan dalam struktur pemerintahan lokal termasuk salah satu yang terendah di negeri tersebut.

Adanya forum perempuan akan memainkan peran utama dalam melakukan dan memulai kegiatan untuk mengembangkan keterampilan, kapasitas dan kepercayaan dari para wanita Ampara. Ini didasarkan pada keberhasilan Women's Leadership Development Project (WLDP), yang dilaksanakan oleh Transition Recovery Programme (TRP) dengan dukungan dana yang disediakan oleh UNDP. Tujuannya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di Ampara melalui pelatihan, jaringan dan dukungan.

Menurut UNDP, representasi perempuan Sri Lanka di parlemen nasional berada pada 5,6%. Angka ini merupakan salah satu yang terendah di Asia Selatan. Perempuan di negara ini sebelumnya terkena dampak konflik dan menghadapi tantangan lainnya. Beban ekonomi dan sosial akibat kehilangan anggota keluarga laki-laki dan hidup di daerah yang sulit merupakan masalah berat.

Dengan latar belakang ini, program WLDP dari UNDP bekerja dengan 30 perempuan dari distrik yang sebelumnya terkena dampak konflik di Ampara. Program ini dilaksanakan dengan menyediakan pengembangan kapasitas, paparan, jaringan dan dana untuk memulai kegiatan. Selama dua tahun, proyek ini melihat pemimpin perempuan melaksanakan proyek komunitas mereka sendiri dalam meningkatkan kesadaran tentang isu-isu mendesak dalam komunitas mereka dan mengangkat kehidupan perempuan.

Lalith Kulanayake, salah satu pemimpin perempuan yang ikut pelatihan WLDP, memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai pemerintah daerah. Setelah berhasil terpilih, ia menjadi wakil perempuan pertama untuk melayani daerahnya dalam perkembangan masyarakat (The Sunday Leader, 2012).

Sementara itu The Sri Lanka Women's NGO Forum (SLWNGOF) telah resmi dibentuk pada tahun 1993 yang awalnya bertujuan untuk penyebaran informasi antar LSM di Sri Lanka pada konferensi keempat dunia mengenai kaum perempuan. Forum SLWNGOF telah berkontribusi dalam mempromosikan agenda dari BPFA di Sri Lanka. Programnya dilakukan dengan memfasilitasi berbagai bentuk partisipasi dari kaum perempuan agar lebih diperhatikan dan turut diprioritaskan. Dalam mensosialisasikan program tersebut, lebih dari 45 LSM mewakili kaum perempuan di dalam forum LSM tentang perempuan pada tahun 1995 di kota Beijing. SLWNGOF telah membangun suatu jaringan, tercatat lebih dari 60 LSM yang terdapat di seluruh bagian di Sri Lanka (womenandmedia.net, 2011).

Sejak tahun 1996, SLWNGOF telah bekerja dalam membangun kemitraan dengan beberapa negara di Asia Selatan melalui badan The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP). Hal ini bertujuan untuk mempromosikan pelaksanaan BPFA di Sri Lanka dan di kawasan Asia Selatan. Upaya ini juga secara teratur dievaluasi oleh United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) mengenai proses BPFA selama lima tahun terakhir.

SLWNGOF adalah anggota dari badan South Asia Women's Watch (SAWW) dan juga diwakili di dalam sebuah komite pengarah The Asia Pacific Women's Watch (APWW). SLWNGOF sebagai anggota inti dari SAWW, pada kuartal pertama tahun 2004 mengadakan konsultasi nasional dengan jaringan LSM pada pelaksanaan BPFA dan CEDAW (Anderson dkk, 2008).

Secara nasional, SLWNGOF telah berkonsultasi dengan badan-badan negara yang ada di Sri Lanka seperti Kementerian Urusan Perempuan dan juga oleh Komite Nasional Perempuan. Hal ini berhubungan dengan berbagai agenda perencanaan pada tingkat nasional serta penyusunan kebijakan baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak-hak kaum perempuan di Sri Lanka. Anggota komite SLWNGOF adalah narasumber bagi Kementerian Urusan Perempuan dan anggota Komite Nasional Perempuan. SLWNGOF telah terlibat dalam The Women's Charter of Sri Lanka, wacana National Plan of Action on Women, dan turut berkonsultasi dalam penyusunan kebijakan pemerintah lainnya. Salah satu contoh seperti laporan dalam mengetahui status perempuan di negara tersebut.

SLWNGOF juga merupakan bagian dari lobi oleh organisasi-organisasi perempuan kepada Komite Parlemen Terpilih dari Reformasi Pemilihan pada tahun 2003. Fungsinya turut menyerukan langkah-langkah sementara yang akan diambil khususnya untuk menjamin partisipasi, keterlibatan, serta representasi kaum perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan di Sri Lanka.

Jaringan organisasi perempuan dan organisasi berbasis komunitas yang bekerja sama dengan forum SLWNGOF di Sri Lanka datang dari semua komunitas etnis di Sri Lanka dari berbagai wilayah geografis dan ekonomi Sri Lanka. Sebagai contoh, organisasi dari sektor perkebunan di provinsi Timur telah mempertahankan hubungan baik dengan sebuah organisasi besar perempuan di bagian Utara, serta mereka yang bekerja dengan perempuan dari desa-desa perbatasan di bagian Utara sampai pada bagian Timur.

Masalah promosi perdamaian dan harmoni etnis serta penyelesaian konflik etnis di Sri Lanka telah menjadi perhatian penting bagi SLWNGOF. Pada bulan September tahun 2009, SLWNGOF menyelenggarakan pertemuan konsultasi nasional di Beijing yang ke-15 dan berkonsultasi dengan Center For The Women's Research (CENWOR). Hal ini berkaitan dalam rangka persiapan untuk meninjau kemajuan deklarasi BPFA pada tahun berikutnya. Upaya ini membuahkan berbagai hasil dari konsultasi tingkat sementara untuk mengidentifikasi keberhasilan dan strategi dalam mengatasi tantangan yang masih dihadapi di Sri Lanka (UN ESCAP, 2011).

Sebanyak 55 negara peserta hadir dari seluruh negara yang mewakili beragam organisasi perempuan dari sektor pemerintah. Program tersebut sangat informatif dengan banyaknya peserta yang berbagi pandangan dan pengalaman mereka.

Dalam wawancara Groundviews, forum telah mempertimbangkan tindakan afirmatif misalnya, apakah masuknya kans perempuan ke ranah politik atau parlemen dengan cara apapun akan memperkuat advokasi tentang representasi perempuan. Dengan dasar ini, gagasan liberal klasik tentang kesetaraan formal hak perempuan untuk memilih dan dipilih pada jabatan politik, dinilai cukup untuk memberikan perempuan akses terhadap lembaga-lembaga politik.

Peran perempuan pasca-perang Sri Lanka merupakan contoh dari Asia Selatan dan juga seluruh dunia di mana perempuan memainkan peran yang jauh lebih aktif dalam politik. Pengalaman politik atas perempuan di negara pasca konflik ini dinilai sebagai peninjauan dan pembersihan ulang wacana dalam meningkatkan representasi politik perempuan di Sri Lanka.

Chulani mencatat bahwa hambatan utama untuk representasi politik yang setara bagi kaum perempuan dalam lembaga-lembaga politik di Sri Lanka adalah partai politik. Menurutnya, pada kenyataannya lembaga politik merupakan masalah utama yang belum dihadapi secara serius. Hal ini disebabkan karena besarnya biaya peserta pemilu, adanya premanisme dan kekerasan, persaingan dalam partai, dan kurangnya dukungan untuk kandidat perempuan dari pihak laki-laki. Ini terlihat dengan sedikitnya perempuan yang ditawarkan (Wluml.org, 2010).

Meskipun beberapa dekade telah berlalu sejak era perdana menteri Sirimavo Bandaranaike, kaum perempuan tidak cukup terwakili dalam ranah politik. Persentase perempuan hanya 5,8% di tingkat parlemen, 4,1% di tingkat provinsi, dan 1,8 % pada pemerintahan daerah. Ini adalah jumlah persentase yang paling rendah pada tingkat pemerintah daerah dari seluruh dunia (Navhindtimes.in. (2010).

Setelah perjuangan kesetaraan gender melewati beberapa dekade, kaum perempuan meyakini bahwa mereka seharusnya berada pada suatu tempat di mana kekuasaan berada di dalam posisi untuk menegosiasikan kesepakatan yang lebih baik bagi perempuan.

Pemerintah Sri Lanka sudah seharusnya meninjau kembali semua peraturan yang ada dan bekerja untuk membawa perubahan yang diperlukan. Undang-undang tentang kuota minimal 25% perempuan di parlemen masih perlu diimplementasikan. Hal ini penting untuk meningkatkan pencalonan kandidat perempuan di semua tingkat. Meski sudah sejak lama menjadi perdebatan di kalangan pemerintah, tetapi sampai saat ini hal tersebut masih belum dapat terealisasi.

## **Penutup**

Kebebasan perempuan di negara berkembang seperti Sri Lanka masih menjadi masalah klasik yang belum terselesaikan hingga hari ini. Masalah sosial budaya yang

masih kuat melekat di masyarakat menjadi faktor utama ketidakbebasan perempuan dalam menggunakan dan menentukan hak kebebasannya. Teutama terkait hak perempuan dalam partisipasi politik praktis, Sri Lanka bisa dikatakan menomorduakan perempuan. Budaya dan adat istiadat asli masyarakat Sri Lanka yang memang menempatkan perempuan sebagai fungsi rumah tangga an sich, menjadikan perempuan-perempuan Sri Lanka tidak memiliki "mindset" untuk memulai perubahan radikal dalam dirinya dan perubahan bagi masyarakat secara umum.

Faktor sosial budaya juga yang menyebabkan cara pandang pemangku kepentingan yang didominasi laki-laki membuat kebijakan yang disahkan menjadi bias gender. Padahal, perundang-undangan yang sehat dan membebaskan kaum perempuan adalah harapan utama untuk kesetaraan perempuan di Sri Lanka. Revolusi besar-besaran terhadap cara pandang bias gender ini menjadi solusi mutakhir demi tuntutan perubahan kesetaraan perempuan yang tidak mungkin diebendung lagi, dengan harapan hal ini mampu mempengaruhi dan merubah pikiran para pembuat kebijakan agar mempertimbang perempuan dalam setiap kebijakannya.

Sumbangsih dunia terhadap masalah diskriminasi perempuan di Sri Lanka ini sangatlah diperlukan. Berbagai bentuk sumbangsih lembaga Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti sosialisasi, dan peningkatan pendidikan dan juga pengetahuan di masyarakat secara langsung. Hal ini akan sangat mencerahkan masyarakat Sri Lanka secara khusus yang memang memerlukan pendidikan kritis seperti itu. Selain itu menunjukkan lembaga-lembaga dunia tidak diam saja terhadap masalah-masalah yang dihadapi umat manusia saat ini.

## Referensi

- Anderson, K., Arvidson, T., Hagiwara, T., Itamoto, K., Mueller, H., & Osborne-Neill, A. (2008). Challenges to Implementing CEDAW in Southeast Asia. Assembly, U. G. (1979). Convention on the elimination of all forms of discrimination against women. Retrieved April, 20, 2006.
- Jayaweera, S. (2000). "Implementation of the Beijing Platform for Action - Sri Lanka." AWORC. diakses pada 24 Maret 2019, dari <http://www.aworc.org/bpfa/res/crep/sr00001.html>,
- Navhindtimes.in. (2010). "Sri Lanka's Vibrant Women Missing in Politics", diakses pada 20 Januari 2019, dari <http://www.navhindtimes.in/panorama/sri-lanka-s-vibrant-women-missing-politics>
- Pinto-Jayawardena, K. (2003). Proportional representation, political violence and the participation of women in the political process in Sri Lanka. *Can Democracy Be Designed? The Politics of Institutional Choice in Conflict Torn Societies*, 170-193.

- The Sunday Leader. (2012). "Sri Lanka still poor on women's political participation." diakses pada 16 Maret 2019, dari <http://www.thesundayleader.lk/2012/04/04/sri-lanka-still-poor-on-womens-political-participation>,
- UN ESCAP. (2011). "Bringing the Beijing Platform for Action to the Grass Roots", diakses pada 20 Januari 2019, dari <http://www.unescap.org/esid/GAD/Publication/Bringing.pdf>
- Wickramasinghe, M., & Kodikara, C. (2012). Representation in politics: Women and gender in the Sri Lankan republic. *The Sri Lankan Republic at, 40*, 772-820.
- Wluml.org. (2010). *Sri Lanka: Why women in politics always matters: A conversation with Chulani Kodikara | Women Reclaiming and Redefining Cultures*. diakses pada 24 Maret 2019, dari <http://www.wluml.org/node/6735>
- Womenandmedia.net. (2011). "SRI Lanka Women's NGO Forum (SLWNGOF)" diakses pada 24 Maret 2019, dari <http://www.womenandmedia.net/network/SLWNGOF.html>
- Yusoff, M. A., Sarjoon, A., & Othman, S. (2016). Parliamentary democracy and representation of women: A comparative analysis of Sri Lankan and Malaysian Stances. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 5(1), 111.